



PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PENGALOKASIAN DANA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA MOYO KECAMATAN MOYO HILIR KABUPATEN SUMBAWA

Dito Aditya Dwi Prasetyo*), Rudi Masniadi
Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Binis
Universitas Teknologi Sumbawa, Sumbawa 84371 Indonesia
dhitoaditya177@gmail.com, rudi.masniadi@uts.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat Desa Moyo Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa dalam Pengalokasian Dana Desa sebagai upaya memberdayakan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode observasi lapangan. Informan dalam penelitian ini adalah pejabat Desa Moyo dan masyarakat yang menjadi keterwakilan setiap dusun yang ada di Desa Moyo. Adapun data penelitian diperoleh menggunakan wawancara langsung di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap alokasi dana desa yang dilakukan Pemerintah Desa Moyo dalam memberdayakan masyarakat menunjukkan persepsi negatif. Hal tersebut dikarenakan beberapa aspek diantaranya adalah modal usaha, pelatihan masyarakat, bantuan alat produksi serta peningkatan ekonomi. Keempat aspek tersebut menunjukkan persepsi negatif dari masyarakat dengan ketidakadaan peran desa dalam memberdayakan masyarakat.

Kata Kunci : Persepsi, Alokasi Dana Desa, Pemberdayaan Masyarakat.

ABSTRACT

This study aims to determine the perception of the people of Moyo Village Moyo Hilir District, Sumbawa Regency in Village Fund Allocation as an effort to empower the community. This research uses qualitative approach with field observation method. Informants in this research is Moyo Village officials and the community who become the representation of every hamlet in Moyo Village. As for the research data obtained using direct interviews in the field. Research result shows that the community's perception of the allocation of village funds carried out by the Moyo Village Government in empowering the community show negative perceptions. This is due to several aspects including business capital, community training, production equipment assistance and economic improvement. These four aspects show a negative perception of community with the absence of the role of the village in empowering the community.

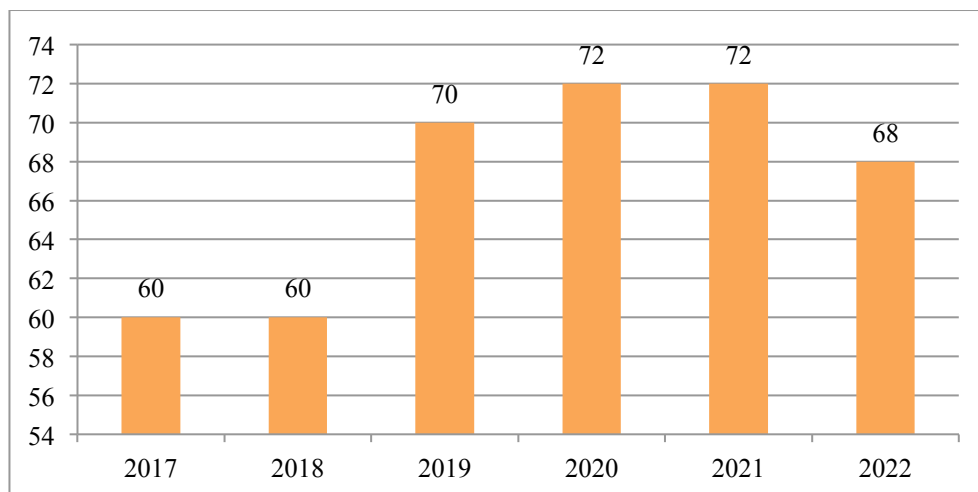
Keywords: Perception, Village Fund Allocation, Community Empowerment.

I. PENDAHULUAN

Pembangunan desa merupakan suatu gerakan masyarakat dalam meningkatkan pembangunan yang dilandasi dengan kesadaran untuk meningkatkan kualitas hidup menjadi lebih baik. Indonesia merupakan Negara yang sebagai besar penduduknya hidup di perdesaan. Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, kemudian didukung oleh surplus penduduk produktif merupakan suatu asset yang dapat dimanfaatkan melalui adanya Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi dana desa adalah dana yang bersumber dari pemerintah pusat, yang diberikan kepada desa untuk membangun desa. Semakin tinggi dana desa yang disediakan, semakin tinggi tingkat pembangunan desa. Peningkatan tingkat perkembangan ini dapat

meningkatkan ekonomi kegiatan masyarakat kabupaten bima. Oleh karena itu, semakin tinggi dana desa, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Pendapat ini menunjukkan bahwa alokasi dana desa memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi daerah.

Pengalokasian dana desa sendiri telah dilakukan pemerintah sejak tahun 2015. Alokasi dana desa dimaksudkan sebagai bantuan stimulus untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa sebagai wujud usaha membangun Negara melalui desa. Adapun jumlah alokasi dana desa yang disalurkan pemerintah adalah sebagai berikut:



Gambar 1.1 Alokasi Dana Desa Melalui APBN Tahun 2017-2022

(Sumber : Data APBN, diolah oleh peneliti)

Dari data di atas, dapat kita lihat bahwa alokasi dana desa yang diberikan pemerintah meningkat dari tahun 2017 sampai dengan 2021. Akan tetapi kemudian menurun pada tahun 2022 akibat kebijakan pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi secara makro yang digelontorkan pemerintah pusat.

Pada umumnya, masyarakat diberi peran yang lebih besar dalam pembangunan desanya. Dalam hal ini, masyarakat memiliki keterlibatan secara langsung dalam proses perancangan alokasi dana desa melalui BPD, kepala dusun serta tokoh dan elemen masyarakat yang ditetapkan pemerintah desa untuk ikut dalam Musyawarah Desa (MUSDES) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MUSREMBANGDES) dalam menyusun alokasi anggaran tahunan. Hal tersebut menjadikan peran masyarakat sangat berpengaruh dalam pembangunan dan pemberdayaan desa.

Keadaan tersebut menjadikan persepsi masyarakat sangat diperlukan baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun tahap evaluasi program yang dijalankan oleh desa. Isti, dkk (2017) menyebutkan bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat persepsi masyarakat terhadap pemanfaatan dana desa dalam memberdayakan masyarakat. Hasil penelitian tersebut menunjukkan pentingnya persepsi masyarakat selaku pelaku demokrasi yang dimana Dana Desa merupakan hasil pajak mereka dalam mempengaruhi kebijakan desa supaya Dana Desa dapat memberdayakan masyarakat setempat. Adapun bentuk pemberdayaan masyarakat melalui Dana Desa dapat dilakukan dengan banyak program salah satunya Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang prioritas pembangunan dana desa tahun 2021 menyebutkan bahwa prioritas pengalokasian dan desa dilakukan untuk program dan atau kegiatan pencapaian SDGs melalui pemulihan ekonomi nasional, program prioritas sesuai kewenangan desa dan adaptasi kebiasaan baru desa. Adapun wujud pengalokasian yang harus dilakukan desa berdasarkan Peraturan Menteri tersebut adalah pembentukan, pembangunan, dan revitalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang merupakan salah satu wujud pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah desa tidak termasuk Desa Moyo.

Desa Moyo merupakan sebuah desa yang merupakan bagian administratif dari kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Desa Moyo Nomor 01 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Moyo Tahun Anggaran 2022 menyebutkan bahwa jumlah dana bidang pemberdayaan masyarakat adalah sebesar Rp104.269.600. Jumlah tersebut dapat dikatakan sangat kecil dari jumlah total pengeluaran yang mencapai Rp1.301.714.100. Dari jumlah total Dana Desa yang ada, dapat diketahui bahwa total anggaran untuk pemberdayaan hanya sebesar 12,48%. Hal tersebut menunjukkan kekurangan yang serius dari pemerintah Desa Moyo dalam mencapai tujuan Peraturan Menteri Desa guna mencapai percepatan SDGs.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sholeh (2019) menunjukkan bahwa alokasi Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat memiliki dampak terhadap masyarakat. Dampak yang diterima masyarakat berupa kesadaran dan keinginan untuk berubah, tingkat kemampuan dalam meningkatkan kapasitas untuk memperoleh akses, tingkat kemampuan menghadapi hambatan, serta tingkat kerjasama untuk pemberdayaan yang dilakukan melalui BUMDes.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode observasi lapangan. Informan dalam penelitian ini adalah pejabat Desa Moyo dan masyarakat yang menjadi keterwakilan setiap dusun yang ada di Desa Moyo. Adapun data penelitian diperoleh menggunakan wawancara langsung di lapangan. Selain wawancara, metode dokumentasi juga digunakan sebagai pelengkap yaitu dengan mendokumentasikan seluruh rangkaian kegiatan penelitian dari awal sampai akhir dengan catatan, foto dan perekaman audio dan video. Dalam menentukan kesimpulan penelitian, ada beberapa tahap analisis data yang dilakukan diantaranya adalah reduksi data, penyajian data, kemudian penarikan kesimpulan.

III. HASIL PENELITIAN

Persepsi masyarakat adalah suatu proses penafsiran stimuli yang diperoleh indera manusia. Proses indera menangkap stimuli dinamakan sensasi. Jadi sensasi stimuli yang dilingkungan. Agar stimuli memiliki makna-makna komunikasi melakukan persepsi yang bergantung pada pikiran dan perasaannya (Suranto, 2011). Pemerintahan dan masyarakat desa mulai mengelola pembangunan di desanya secara lebih otonom. Alokasi Dana Desa (ADD) yang diberikan tersebut, pada prinsipnya harus menganut prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi maupun efisiensi. Pengelolaan keuangan desa yang diberikan kepada daerah melalui Alokasi Dana Desa (ADD) pada prinsipnya tetap mengacu pada pokok pengelolaan keuangan daerah (Permendagri No. 113 Tahun 2014).

Pengelolaan Dana Desa yaitu tertib dan disiplin anggaran yang artinya pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya (Renyowijoyo 2013).

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan, persepsi masyarakat terhadap pengelolaan Dana Desa dalam pemberdayaan menunjukkan persepsi negatif. Beberapa hal yang mendorong pendapat tersebut adalah ketidakpuasan terhadap berbagai macam bentuk program ekonomi produktif yang mendorong pemberdayaan masyarakat. Dalam wawancara yang telah dilakukan, peneliti memberikan pernyataan terkait dengan pemberdayaan diantaranya adalah modal usaha, pelatihan masyarakat, bantuan alat-alat produksi, dan peningkatan ekonomi.

Modal Usaha

Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, desa merupakan agen pemerintah terdepan yang dapat menjangkau kelompok sasaran riil yang hendak disejahterakan, yaitu dengan membentuk suatu badan usaha yaitu Badan Usaha Milik Desa yang sesuai dengan permendagri nomor 39 tahun 2010 tentang badan usaha milik desa, yang menyebutkan bahwa:

“Untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat pedesaan, didirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”

Melihat posisi badan usaha milik desa ini dalam menghadapi realitas arus desak intervensi modal domestik dan asing yang kini menjadikan desa sebagai sasaran pengembangan usaha sangat keras sekali, disamping itu badan usaha milik desa ini hanya bermodal tak seberapa jika dibandingkan dengan swasta bermodal besar maka posisi badan usaha milik desa ini tak dapat dibandingkan. Dengan sumberdaya alam yang dimiliki oleh desa, hal ini sangat rawan sekali terjadi intervensi modal dan pasar di pedesaan. Kehadiran badan usaha milik desa ini sendiri akan menjadi penangkal bagi kekuatan korporasi asing dan nasional. Diharapkan badan usaha milik desa ini mampu menggerakkan dinamika ekonomi desa, dan sebagai perusahaan desa. Namun dalam operasionalnya BUMDes terkendala oleh modal. Melihat kondisi desa yang selama ini sangat minim anggaran maka sulit untuk merealisasikan produk-produk rencana desa sekaligus juga makin meningkatkan apatisme masyarakat.

Seperti yang dialami oleh Desa Moyo Kecamatan Moyo Hilir dimana penyertaan modal yang dilakukan Pemerintah Desa melalui BUMDES tidak berjalan efektif. Hal tersebut dinyatakan oleh M Deniansyah sebagai berikut.

“Kami melakukan usaha dengan modal sendiri. Pemerintah desa melalui BUMDes belum ada upaya penyertaan modal di kami. Terutama kami para petani”

Hal tersebut juga dinyatakan oleh Tohri Ramdani selaku masyarakat Dusun Moyo Luar.

“Dalam hal perjalanan usaha, kami disini urus diri sendiri. Peran desa itu hampir tidak ada dalam penyertaan modal. Kami hutang sendiri. Jadi sejauh ini tidak ada penyertaan atau pemberian modal usaha dari pemerintah desa”

Selain itu, Akbar Erwinsyah berpendapat bahwa

“BUMDes itu punya pengurus dan pengelola usaha sendiri yang hanya diisi oleh beberapa orang. Jadi, kami sebagai masyarakat belum merasakan manfaat dari modal usaha yang dianggarkan melalui ADD oleh desa. Jadi, pemberdayaan masyarakat melalui modal usaha belum dapat kami rasakan”.

Hal yang sama dinyatakan oleh Imam Wardani yang menyatakan bahwa

“Pemberdayaan masyarakat melalui modal usaha yang dipertanyakan oleh saudara dapat saya jawab bahwa hal tersebut tidak ada. Kami disini petani, kami mengajukan ke lembaga peminjaman sendiri. Belum ada bentuk program pemberdayaan masyarakat kewarga yang mayoritas petani”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa persepsi masyarakat terhadap pengalokasian dana desa dalam memberdayakan masyarakat pada indikator modal mendapatkan persepsi negatif. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya andil Pemerintah Desa dalam penyertaan atau pemberian modal bagi masyarakat. Padahal menurut Permatasari (2018) menjelaskan bahwa penyertaan modal yang dilakukan Pemerintah Desa melalui BUMDes dapat sebagai media dalam penguatan ekonomi desa yang kemudian akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat desa.

Pelatihan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat diarahkan pada suatu proses yang membangun manusia atau masyarakat melalui pengembangan kemampuan masyarakat, perubahan perilaku masyarakat, dan pengorganisasian masyarakat. Ada tiga tujuan utama dalam pemberdayaan masyarakat yaitu mengembangkan kemampuan masyarakat, mengubah perilaku masyarakat, dan mengorganisir diri masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya yang ada di Desa Moyo. Kemampuan masyarakat yang dapat dikembangkan tentunya banyak sekali seperti kemampuan untuk berusaha, kemampuan untuk mencari informasi, kemampuan untuk mengelola kegiatan, kemampuan dalam pertanian dan masih banyak lagi sesuai dengan kebutuhan atau permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.

Desa Moyo yang merupakan desa dengan lahan pertanian yang sangat luas memiliki potensi dalam mensejahterakan masyarakat melalui peningkatan kemampuan masyarakat desa dalam mengelola lahan sehingga produktivitas lahan masyarakat meningkat. Akan tetapi, sejauh tahun 2021 tidak ada bentuk upaya pelatihan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah desa. Hal tersebut mengundang persepsi yang kurang baik dimasyarakat terhadap pengalokasian Dana Desa dalam memberdayakan masyarakat.

Akbar Erwinsyah yang merupakan masyarakat Dusun Berang Beru menyatakan.

“Pelatihan yang diberikan Pemerintah Desa itu tidak mempertimbangkan dampak yang lebih luas. Pemerintah Desa seolah tidak melihat kalau di Desa ini banyak petani. Seharusnya disitu Pemerintah Desa ikut hadir di tengah kami sehingga dapat meningkatkan produktifitas usaha kami”

Selain itu, Imam Wardani masyarakat Dusun Kapas Sari menjelaskan bahwa ketiadaan peran desa dalam memberikan pelatihan yang dapat mendorong cara bertani masyarakat menjadi lebih baik menunjukkan perlakuan yang pasif. Hal itu dikarenakan tidak adanya wujud usaha lebih dari Pemerintah Desa dalam memberikan pelatihan yang dapat meningkatkan kapasitas petani. Padahal, menurut M Deniansyah masyarakat dusun Karang Orong menjelaskan bahwa, pemberian pelatihan tidak hanya dapat dilakukan dengan mengandalkan Dana Desa. Akan tetapi, dapat bekerjasama dengan penyuluh pertanian dan instansi terkait.

Hal yang sama juga dinyatakan oleh Tohri Ramdani. Dimana hasil wawancaranya adalah sebagai berikut.

“Saya bingung ingin menjawab apa. Karena seperti yang saya rasakan, pelatihan masyarakat yang saudara pertanyakan tidak saya tau wujudnya. Bahkan di masa PMK menyerang Indonesia dengan beberapa sapi mati karena penyakit tersebut, kami kalang kabut untuk mencari tau bagaimana cara menyembuhkannya. Jadi, saya rasa pelatihan masyarakat sebagai wujud pemberdayaan masyarakat belum kami dapati secara efektif dan efisien”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa pelatihan masyarakat sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat desa tidak direncanakan dengan baik. Seharusnya pelatihan masyarakat direncanakan dan dianggarkan sesuai dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat.

Pemberian pelatihan yang dilakukan Pemerintah Desa dapat membuat kondusifitas baru pada perekonomian masyarakat. Pernyataan tersebut benar adanya dimana apabila para petani selaku mayoritas masyarakat di Desa Moyo mendapatkan pelatihan tentang aspek yang mendorong meningkatnya hasil pertanian akan menjadikan masyarakat mandiri dan kondisi ekonomi masyarakat akan semakin sejahtera.

Bantuan alat-alat produksi

Mirawati (2018) menjelaskan bahwa pemberian bantuan alat bekerja dalam hal ini alat tangkap ikan di Kecamatan Bolo Kabupaten Bima yang merupakan program desa dalam memberdayakan masyarakat dapat mendorong peningkatan ekonomi masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa peran desa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat melalui program pemberdayaan masyarakat sangat penting. Adanya bantuan berupa alat produksi akan menyebabkan biaya produksi masyarakat akan menurun dan secara bersamaan akan meningkatkan laba pada usaha yang dilakukan masyarakat.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, mayoritas masyarakat Desa Moyo merupakan petani. Dalam hal tersebut, dalam proses produksi, baik mulai dari pembersihan lahan, penanaman sampai pada tahap panen beberapa diantaranya masih menggunakan cara tradisional. Keadaan tersebut memerlukan andil pemerintah desa dalam meningkatkan efisiensi tenaga dan biaya masyarakat.

Hal tersebut dinyatakan oleh responden Imam Wardani yang menyatakan bahwa

“Saya melihat di Youtube dan Facebook bagaimana para petani di luar menggunakan alat tanam yang otomatis. Kami disini masih manual dan memerlukan banyak biaya. Desa seharusnya menggunakan peluang itu sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bisa dilakukan melalui penganggaran DD yang diberikan kepada masing-masing dusun, nanti bisa digunakan secara bergiliran.”

Akbar Erwinsyah juga menjelaskan

“nggak ada sama sekali peran desa dalam hal alat pertanian. Kami bawa diri masing-masing”

Selain itu, Tohri Ramdani menjelaskan dalam wawancara sebagai berikut.

“Sejauh ini, tidak ada bantuan alat produksi, baik alat produksi primer maupun sekunder dari Dana Desa. Akan tetapi, pemerintah desa seringkali proaktif dalam memberitahu kami tentang adanya bantuan alat produksi dari aspirasi dewan atau

instansi pemerintahan terkait melalui proposal. Kami biasa ikut program dari sana. Kalau anggaran dari Desa, tidak ada”

Hal yang sama juga dinyatakan oleh DM bahwa

“Pemberdayaan masyarakat melalui pemberian alat-alat produksi tidak ada di Desa ini. Hemat saya, mungkin karena mayoritas masyarakat petani, jadi kalau dianggarkan melalui DD nanti susah merata dikarenakan banyak. Itu asumsi saya saja. Tapi kalau menyangkut pertanyaan yang saudara pertanyakan, program pemberdayaan masyarakat melalui pemberian alat-alat produksi sejauh ini belum ada”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat kita ketahui bahwa persepsi masyarakat terhadap pemberdayaan masyarakat dalam hal ini pemberian alat-alat pertanian menunjukkan respon yang negatif. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya andil desa dalam proses produksi yang dilakukan petani Desa Moyo. Pemberian alat ini sangat penting bagi masyarakat guna mengefisiensi tenaga dan biaya sehingga laba produksi masyarakat dapat meningkat. Hal tersebut kemudian akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Peningkatan Ekonomi

Desa merupakan bagian penting dalam meningkatkan ekonomi secara menyeluruh. Salah satu tujuan digelontorkannya Dana Desa oleh pemerintah pusat adalah peningkatan ekonomi dari bawah yakni dari desa. Kemajuan ekonomi nasional hanya akan tercapai jika terdapat iklim perekonomian yang baik di tingkat provinsi. Kemajuan ekonomi ditingkat provinsi akan tercapai jika kabupaten memiliki kegiatan ekonomi yang baik. Sebuah kabupaten dikatakan memiliki ekonomi yang baik jika adanya sumbangsih dari ekonomi pedesaan yang kuat yang akan berimbas pada kesejahteraan masyarakat luas. Dengan hal ini akan menjamin penyelenggaraan pemerintah yang baik untuk diterapkan di seluruh tingkat pembangunan dan keputusan yang diambil berdasarkan kebutuhan nyata dari masyarakat. Tak hanya itu, apabila ekonomi di pedesaan baik maka akan memberi peluang bagi kemampuan daerah dan pedesaan sebagai tulang punggung ekonomi regional dan nasional.

Pembangunan nasional dilakukan dari pinggiran dengan cara memperkuat daerah-daerah kecil dalam rangka negara kesatuan seperti halnya pada desa merupakan Sembilan program Nawacita dan wakil presiden Indonesia. Langkah ini dipandang strategis untuk menjadi pijakan dalam menciptakan Negara yang makmur dan juga menjadi tonggak dalam menghadapi persaingan global saat ini. Desa merupakan bagian wilayah terbawah dan sudah bisa dipandang sebagai daerah miskin menjadikan pemerintah memiliki tugas untuk memberi perhatian yang besar dalam membantu mengetaskan kemiskinan. Pembangunan desa menjadi perhatian yang besar dalam membantu mengetaskan kemiskinan. Pembangunan desa menjadi salah satu langkah digarda belakang sebagai strategi dalam membantu mewujudkan Negara yang makmur dan sejahtera. Menurut UU No. 4 tahun 2014 menyebutkan bahwa pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Pembangunan desa pada hakikatnya untuk membangun kemandirian. Melalui pemberdayaan masyarakat. Pedesaan dapat berkembang untuk meningkatkan produktivitas dan keanekaragaman usaha, membangun dan memperkuat institusi yang mendukung rantai produksi dan pemasaran. Serta mengoptimalkan sumber daya sebagai dasar pertumbuhan ekonomi pedesaan.

Akan tetapi, di Desa Moyo upaya peningkatan ekonomi melalui desa belum menunjukkan dampak yang signifikan. Hal ini erat kaitannya dengan beberapa pembahasan sebelumnya yakni belum adanya andil desa dalam penyertaan dan pemberian modal, pelatihan atau pemberian alat-alat produksi. Hal tersebut juga dijelaskan oleh responden penelitian Tohri Ramdani sebagai berikut.

“Kami di desa ini hanya urus diri sendiri. Upaya pemberdayaan dalam meningkatkan ekonomi itu tidak ada wujudnya. ADD yang ada lebih banyak di alokasikan untuk keperluan gaji dan operasional pemerintahan desa. Sementara untuk pemberdayaan hanya sebagian beberapa persen dari total DD yang didapatkan. Mas bisa cek sendiri”

Imam Wardani juga menjelaskan

“kalau menurut saya, salah satu program desa dalam upaya meningkatkan ekonomi masyarakat itu salah satunya BLT. Kan sudah jelas dari pusat bahwa BLT tersebut dipergunakan untuk membantu memenuhi kebutuhan pokok. Jadi menurut saya itu sudah bagian dari program desa dalam memberdayakan masyarakat sebagai usaha meningkatkan ekonomi masyarakat”.

Berbeda dengan Imam Wardani, M Deniansyah menyatakan dalam wawancara sebagai berikut.

“saya rasa, program yang secara nyata yang dilaksanakan desa dalam upaya peningkatan ekonomi sebagai wujud pemberdayaan masyarakat belum terlihat signifikan. Karena dana desa lebih banyak untuk penyelenggaraan pemerintah”

Hal yang berbeda dinyatakan oleh Akbar Erwinsyah yang menyebutkan bahwa

“Satu-satunya wujud nyata pemerintah desa dalam upaya peningkatan ekonomi adalah dengan program jalan tani dan irigasi. Ini menurut saya sangat saya rasakan dengan adanya dana desa. Akan tetapi, kondisi covid di tahun 2021 membuat program tersebut tidak jalan maksimal. Tidak bisa disalahkan juga, karena dana desa dipergunakan untuk membantu masyarakat dalam bentuk bantuan langsung tunai”

Pernyataan tersebut benar adanya, dimana persentase Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat hanya sebesar 5,5% atau sejumlah Rp63.370.500 dari total DD yang mencapai Rp1.347.958.900. Hal tersebut menunjukkan bahwa dana pemberdayaan masyarakat sangat kecil apabila dibandingkan dengan dana penyelenggaraan pemerintah yang mencapai Rp689.263.200 atau 51,3% dari total ADD. Jumlah tersebut menunjukkan ketimpangan yang sangat mencolok yang menyebabkan persepsi masyarakat terhadap pengalokasian Dana Desa dalam upaya memberdayakan masyarakat menunjukkan persepsi negatif.

Berdasarkan pembahasan-pembahasan di atas, Pemerintah Desa Moyo memberikan klarifikasi terkait dengan pernyataan masyarakat tentang upaya pemerintah desa dalam mengalokasikan ADD sebagai upaya dalam memberdayakan masyarakat. Pemerintah Desa melalui Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Ketua BPD menyatakan bahwa minimnya dana pemberdayaan masyarakat pada tahun 2021 adalah dikarenakan instruksi nasional yang mengharuskan ADD dilakukan guna memperbaiki perekonomian masyarakat melalui bantuan langsung tunai (BLT) yang menghabiskan dana ratusan juta. Mereka menilai hal tersebut merupakan bentuk upaya Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Desa dalam memberdayakan

masyarakat. Pemulihan ekonomi pasca Covid menyebabkan ADD dalam pos anggaran pemberdayaan masyarakat menurun. Hal tersebut mau tidak mau dilakukan desa atas dasar peraturan dari Pemerintah Pusat.

IV. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat diketahui bahwa persepsi masyarakat Desa Moyo terhadap pengalokasian dana desa dalam upaya pemberdayaan masyarakat menunjukkan persepsi negatif. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya andil desa dalam upaya memberdayakan masyarakat. Diantaranya adalah ketiadaan penyertaan dan pemberian modal desa dalam membantu masyarakat, ketiadaan program pelatihan-pelatihan yang direncanakan melalui Dana Desa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tidak adanya pemberian alat-alat produksi sebagai penunjang masyarakat dalam berusaha serta kurangnya bentuk usaha peningkatan ekonomi secara nyata.

Pemerintah Moyo Desa pada dasarnya sudah berusaha untuk menganggarkan Dana Desa dalam pos anggaran pemberdayaan masyarakat. Akan tetapi, pasca pandemi Covid-19 Pemerintah Pusat mengeluarkan aturan agar Dana Desa diperuntukkan untuk pemulihan ekonomi berupa pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT)

DAFTAR PUSTAKA

- APBN 2022. 2022. *Alokasi Dana Desa dari Tahun ke Tahun*. Diakses dari katadata.co.id pada 05 Mei 2022
- Isti, Desti Nisa, dkk. 2017. Persepsi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pemanfaatan Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat di Desa Kertajaya Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*. Vol 1, No 1 April 2017.
- Mirawati. 2018. Peningkatan Hasil Tangkap Masyarakat Nelayan di Desa Darussalam Kecamatan Bolo Kabupaten Bima Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Permatasari, Elysabeth, dkk. 2018. Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Journal Conference on Innovation Application of Science and Technology*. ISSN: 2622-1284.
- Renyowijoyo, Muindro. 2013. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Kedua. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Sholeh, Rohman. 2019. Analisis Penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap Pemberdayaan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Sindang Anom Kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur). *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Raden Intan.
- Suranto, A.W. 2011. *Komunikasi Interpersonal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.